

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Belanja Modal, PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2018, mengalami perkembangan yang naik dan juga turun (fluktuatif).
2. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2018 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan hasil ini maka, peningkatan pajak daerah akan meningkatkan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2018 dengan nilai signifikansi 0,024. Artinya peningkatan penerimaan retribusi daerah, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
4. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2018 dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya peningkatan PAD, dapat meningkatkan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

5. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa proporsi pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 26%, sedangkan sisanya 74% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan mendata setiap sumber PAD dan memastikan bahwa tiap sumber tersebut dikenakan pajak atau retribusi sesuai aturan yang berlaku.
2. Melakukan upaya peningkatan Retribusi Daerah, dengan cara mensinkronkan antara data usaha yang telah diberi izin dengan data pembayaran retribusi daerah, agar dapat diketahui retribusi yang masih tertunggak dan belum terdata. dengan demikian, setiap izin usaha akan menjadi sumber retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrudin. 2011. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Boediono, 2001. *Ekonomi Makro*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Burton, Richard. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit. Salemba Empat.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Pres.
- Erly Suandy. 2001. *Perencanaan Pajak*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul . 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- . 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Jogiyanto dan Abdillah, Willy. 2016. *Konsep dan Aplikasi PLS Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- . 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Noor. Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Kencana. Jakarta.
- Rahardjo, Budi. 2009. *Laporan Keuangan Perusahaan, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

-----, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif Cetakan Kedua Belas*. Bandung: Alfabeta

-----, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Yammin, Sofyan dan Kurniawan, Heeri. 2011. *Partial Last Square Paath Modelling*. Jakarta: Salemba Infotek

Jurnal

Fitrianti. 2014. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat). *Jurnal Keuangan* Vol. 3 No. 2 Hal. 56-63.

Juniawan, Made Ari. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud* Vol. 7 No. 3 Hal. 1255-1281.

Sudika, I Komang. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.21 No.2 Hal. 1689-1718.

Usman, Regina. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *Jurnal Manajemen Keuangan* Vol. 6 No. 1 Hal. 57-71.

Tesis

Dewanti, Renidia. 2014. *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Dppka) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Handayani, Sri Putri. 2015. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Intani, Rahmi. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Karyadi, Santika. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Utomo, Okta. 2013. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di DPPKAD Wilayah Karesidenan Surakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No 71 Tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah